Lembar Fakta

$NCKL: Pertanyaan Tentang Nilai

Temuan Utama

- PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) akan membuka penawaran penjualan saham publik atau *Initial Public Offering* (IPO), April ini. Dengan IPO, anak perusahaan Harita Group itu akan mengalami peningkatan kekayaan bersih dari $1,1 miliar menjadi $4,6 miliar dengan menargetkan pertumbuhan pendapatan sampai 100%. Peningkatan dana dari IPO tersebut akan memperparah kerusakan lingkungan, sosial, dan ekonomi yang dilakukan perusahaan smelter PT Trimegah Bangun Persada (PT TBP) di Pulau Obi Halmahera, Maluku Utara.

- Limbah *ore* nikel dari perusahaan ini dialirkan ke laut dan merusak ekosistem perairan hingga perubahan warna laut menjadi cokelat kemerahan. Selain itu, banyak tanah tercemar yang ikut hanyut ke laut saat limbah dipompa ke laut dari pipa pembuangan. Sumber air di desa Kawasi yang bersebelahan dengan tambang nikel juga tidak lagi dapat diakses karena sedimen akibat pertambangan dan pembangunan pabrik yang membuat air menjadi berlumpur dan berwarna cokelat kehitaman.

- Perusahaan dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan juga berencana merelokasi warga Kawasi ke Perumahan *Eco Village*, sekitar 5 kilometer ke arah selatan dari Kawasi. Relokasi ini tidak sekadar pindahnya rumah, tetapi berdampak pada tercerabutnya komunitas warga dari kampung mereka yang punya nilai budaya dan historis, berikut tanah, kebun, dan lautnya sebagai ruang hidup.

- Sektor pertambangan dan pengolahan mineral mendominasi kecelakaan di Maluku Utara sepanjang 2022, khususnya di pengolahan nikel milik Harita Group. Menurut pemberitaan media, selama 2019-2023 tercatat 8 kasus dengan dua orang korban meninggal dunia dan lima orang terluka. Fakta tersebut membantah klaim Harita Group bahwa tidak ada korban jiwa karena kecelakaan kerja selama 2019-2023 dan klaim bahwa perusahaan memperhatikan K3 pekerja.

- Harita Group melalui PT Halmahera Persada Lygend (HPL) menggunakan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) barubara untuk mengoperasikan pabrik pengolahan nikel di Kawasi, Pulau Obi, Maluku Utara. Total PLTU beroperasi 210 MW. HPL merupakan kerjasama antara Harita Group dan Ningbo Lygend asal Tiongkok juga memiliki sekitar 2.030 MW PLTU dalam proses pembangunan dan pra-perizinan. HPL menargetkan total PLTU beroperasi 4.200 MW di Pulau Obi. Pembangunan PLTU tersebut melanggar komitmen Presiden Xi Jinping yang mengatakan pemerintah Tiongkok tak akan membangun PLTU baru di luar negeri.

- Investor pembeli saham Harita Group; Glencore International AG melanggar komitmen mereka atas Perjanjian Paris dan Fidelity International gagal mencapai komitmen untuk mengurangi separuh jejak karbon dari portofolio investasi perusahaan dengan menandatangani *The Net-Zero Asset Managers* dari *Glasgow Financial Alliance for Net Zero* (GFANZ) sebab Harita Group yang menyumbang kerusakan lingkungan dengan penggunaan PLTU hingga limbah tambang yang dibuang sembarangan.

- Penjamin emisi efek Harita Group, yaitu Credit Suisse Group, BNP Paribas, Citigroup, Mandiri Sekuritas, DBS, OCBS Securities, dan UOB Kay Hian. Enam penjamin emisi, kecuali Mandiri Sekuritas, merupakan anggota *Net-Zero Banking Alliance* dari GFANZ yang mendukung kemitraan *Just Energy Transition Partnership* (JETP) Indonesia. Akan tetapi, komitmen untuk transisi energi bersih yang berkeadilan dan janji mendapatkan emisi nol bersih tercederai sebab berafiliasi dengan Harita Group.

Foto: Rabul Sawal/ Mongabay Indonesia

Siapa Harita Group?

PT Trimegah Bangun Persada, anak perusahaan konglomerat Indonesia Harita Group, mengoperasikan smelter pencucian asam bertekanan tinggi pertama di pulau Obi di Maluku Utara, memproduksi 60.000 ton nikel yang telah diproses per tahun.

Entitas konglomerat bisnis Harita Group di sektor hilir pertambangan dan nikel, PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL), menargetkan pertumbuhan pendapatan sebesar 100 persen pada 2023 setelah perseroan menggelar Penawaran Umum Perdana Saham atau Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (IDX) pada April 2023.

PT Trimegah Bangun Persada telah menetapkan harga penawaran umum perdana sebesar 1.250 rupiah untuk mengumpulkan sekitar Rp10 triliun ($669,79 juta) dengan menawarkan hingga 12,67% dari totalnya pada 1.250 rupiah per lembar. Hasil IPO ditetapkan untuk 5-10 April, menurut prospektus perusahaan yang diterbitkan pada Selasa (4 April). Lim Hariyanto Wijaya Sarwono memiliki 82% saham PT Trimegah Bangun Persada melalui perusahaan induknya, Harita Jayaraya dan Citra Duta Jaya Makmur. IPO dapat meningkatkan kekayaan bersihnya dari $1,1 miliar menjadi $4,8 miliar.

Struktur $NCKL

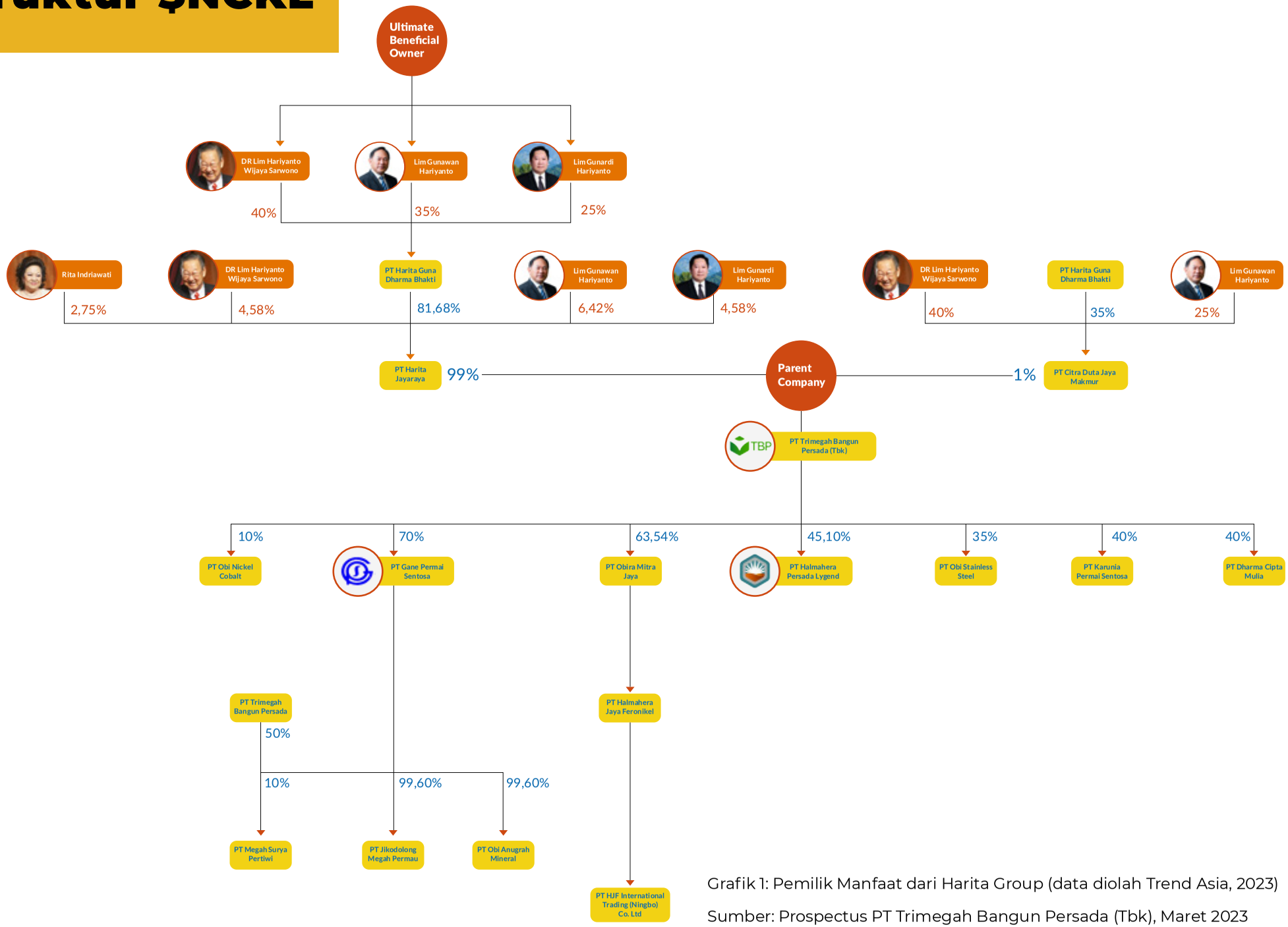

Grafik 1: Pemilik Manfaat dari Harita Group (data diolah Trend Asia, 2023)

Sumber: Prospectus PT Trimegah Bangun Persada (Tbk), Maret 2023

Apa itu teknologi smelter Harita?

Menurut situs webnya, PT Trimegah Bangun Persada mengoperasikan smelter pencucian asam bertekanan tinggi (*high pressure acid leaching*/HPAL) pertama di Indonesia, tepatnya di Pulau Obi di Maluku Utara. Proses HPAL mengubah bijih kadar rendah lokal menjadi endapan hidroksida campuran—suatu bentuk nikel yang dapat diproses lebih lanjut untuk membuat baterai. Fasilitas HPAL-nya memiliki kapasitas produksi 55.000 ton per tahun. Tahun depan, pabrik baru akan meningkatkan produksinya menjadi 120.000 ton. Ada pertanyaan tentang kelestarian lingkungan dari proses HPAL yang digunakan untuk mengekstrak nikel dan kobalt dari bijih laterit.

Berapa banyak uang yang mereka dapatkan dari IPO, dan apa yang harus dilakukan dengan itu?

Menurut prospektus perusahaan, sekitar 42,8 persen dari total dana hasil IPO akan digunakan untuk melunasi utang perseroan dan 3,3 persen dana hasil IPO akan dialokasikan untuk belanja modal. Selanjutnya, sebagian besar dana hasil IPO, sekitar 50,4 persen, akan digunakan untuk kebutuhan anak usaha dan entitas asosiasi. Sisanya sebesar 3,5 persen akan digunakan untuk modal kerja.

Sebagai perusahaan nikel terbesar di Indonesia, proses penambangan yang dilakukan oleh Harita Group berdampak pada beberapa kerusakan dan pencemaran lingkungan sebagai berikut:

Foto: Rabul Sawal/ JATAM

Pembuangan Limbah ke Permukaan dan Dasar Laut

Proses pertambangan yang dilakukan oleh Harita Group diketahui berdampak buruk bagi lingkungan. Salah satunya ialah akibat proses pembuangan limbah nikel yang dilakukan oleh Harita Group. Hal ini dibuktikan dengan pengujian sampel di 12 titik air yang berada di sekitar wilayah pertambangan nikel. Hasilnya, 11 sampel berada dalam standar normal dan 1 sampel yang berada di Sungai Todoku sudah berada di titik tidak normal karena mencapai angka 0,056 miligram/liter. Angka tersebut telah melewati ambang batas aman untuk biota laut, yaitu 0,05 miligram/liter.

Dampak dari pembuangan limbah nikel tersebut adalah rusaknya ekosistem laut di Pulau Obi. Jika hujan turun, maka kandungan nikel yang terendap di dasar laut akan terangkat dan menjadikan laut di Pulau Obi menjadi berwarna cokelat kemerahan.

Pada sisi lain, TBP juga punya rencana untuk membuang limbah slag nikel ke laut, atau yang dikenal dengan *Deep-sea Tailings Disposal* (DSTD) atau Penempatan Tailing Laut Dalam/*Deep-sea Tailing Placement* (DSTP). Melalui mekanisme DSTD, TBP bermaksud membuang sebanyak 6 juta ton sampah ke laut setiap tahunnya. Namun hingga saat ini, usulan tersebut belum terealisasi karena banyaknya penolakan dan kekhawatiran akan kerusakan lingkungan di laut. Di sisi lain, PT Trimegah Bangun Persada berencana melaksanakan DSTP dengan tujuan proyek hidrometalurgi.

Dampak DSTP antara lain akan mengubah lingkungan fisik di lokasi *tailing* didepositkan, Pasca-deposisi tailing yang dibuang di laut dalam dapat memiliki dampak besar pada lingkungan sedimen dan geo-kimia, serta pada pemulihan dan keutuhan komunitas fauna.

Sebagai contoh, pada tambang di Pulau Lihir, Papua Nugini, terdapat DSTP yang telah beroperasi sejak 1996. Sebagai akibatnya, jumlah biota laut secara substansial berkurang di seluruh rentang kedalaman yang diambil sampel (800-2020 meter). Keanekaragaman hayati di laut akan terancam berkurang, sebab DSTP tidak akan bisa mengendalikan persebaran tailing meski sudah diinjeksi jauh di dasar laut.

Meningkatnya degradasi lingkungan dan perampasan tanah

Pulau Obi di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, tempat Harita beroperasi, memiliki luas 254 ribu hektare; sebanyak 49% untuk telah dimiliki oleh perusahaan pertambangan. Harita Group memiliki konsesi tambang nikel total 9.184,23 hektare.

Rata-rata izin penambangan di Pulau Obi berakhir pada 2032, dan tiga izin lainnya berakhir pada 2029, termasuk beberapa perusahaan yang masih terhubung dengan Harita Group. Degradasi lingkungan dan perampasan lahan semakin memburuk karena besarnya izin konsesi pertambangan dan peleburan yang terintegrasi dengan komponen infrastruktur seperti pembangkit listrik tenaga batu bara dan lokasi penyimpanan limbah. Terlepas dari keputusan Harita untuk menarik rencananya membuang 6 juta ton sampah ke laut setelah protes, kerusakan telah terjadi. Banyak tanah yang tercemar sedang hanyut ke laut saat limbah dipompa keluar ke laut dari pipa pembuangan.

Foto: Rabul Sawal/ JATAM

Sumber air Kawasi (Kecamatan Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara) tidak lagi dapat diakses karena sedimen yang disebabkan oleh pertambangan dan pembangunan pabrik. Akibatnya, air menjadi berlumpur, berwarna cokelat kehitaman. Tambang nikel di sebelah timur Kawasi adalah tambang terbuka. Perbukitan berhutan yang terletak sekitar 3 kilometer dari Kawasi sedang dikupas oleh alat berat.

Terkait pemukiman penduduk, Harita Group mengatakan bahwa tanah yang ditinggali masyarakat terlalu dekat dengan pabrik dan terletak di daerah yang rawan gempa. Padahal pemukiman telah ada lebih dahulu daripada pabrik. Hal tersebut menimbulkan relokasi paksa kepada masyarakat yang tidak mempunyai pilihan lain. Menurut laporan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Harita Group telah melakukan proses penambangan yang berdampak buruk bagi lingkungan, baik dalam aspek pencemaran laut, kerusakan biota hingga ekosistem.

Foto: Rabul Sawal/ JATAM

Harita Group Gunakan PLTU Batu Bara untuk Suplai Kebutuhan Smelter

Harita Group melalui HPL menggunakan PLTU batu bara untuk mengoperasikan pabrik pengolahan nikel di Kawasi, Pulau Obi, Maluku Utara. Total PLTU beroperasi 210 MW. Masih terdapat sekitar 2.030 MW kapasitas listrik PLTU dalam proses pembangunan dan pra-perizinan. HPL menargetkan total PLTU berkapasitas 4.200 MW akan beroperasi di Pulau Obi.

Pembangunan PLTU baru dari perusahaan China di Indonesia telah melanggar komitmen dari Presiden China, Xi Jinping, pada September 2021. Xi mengatakan bahwa pemerintah China tidak akan membangun lagi PLTU baru di luar negeri. Kenyataannya, HPL yang merupakan kerja sama antara Harita Group dan Ningbo Lygend yang berencana akan membangun PLTU baru. Ini menunjukkan bahwa nikel diproses secara kotor, mencemari udara, dan berkontribusi pada pemanasan global.

Dengan adanya PLTU sebagai sumber tenaga utama pengolahan nikel, investasi ke Harita sudah jelas kotor dan berbahaya bagi masa depan. PLTU melanggengkan batubara yang terbukti merusak lingkungan dan memicu pemanasan gas rumah kaca serta berpotensi menggagalkan target *net-zero emission* Indonesia tahun 2060.

Kecelakaan Kerja Masih Terus Terjadi

Berdasarkan pemberitaan media terhadap kecelakaan kerja pada entitas anak perusahaan dan afiliasi Harita Group terdapat 8 kasus dengan korban dua orang meninggal dan lima orang terluka. Kecelakaan itu terjadi pada rentang tahun 2019-2023.

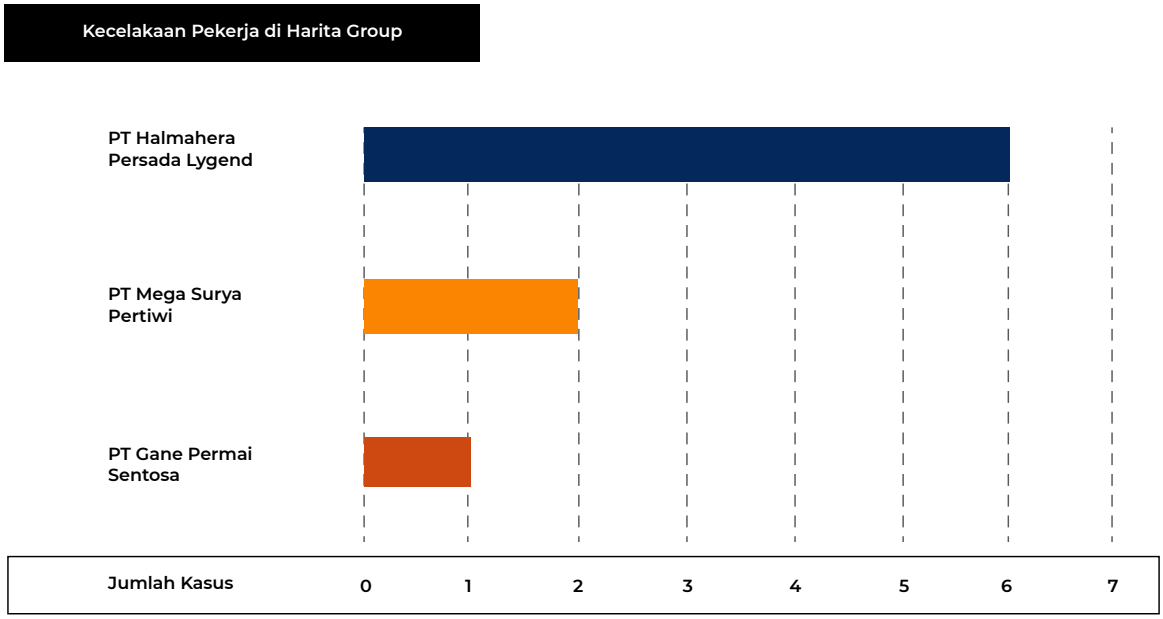

Grafik 2: Kecelakaan Pekerja di Harita Group (data diolah Trend Asia, 2023)

Fakta kecelakaan kerja ini membantah klaim dari Harita Group bahwa selama beroperasi mereka telah memperhatikan aspek esensial dalam operasi perusahaan dan pekerja yaitu kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Fakta ini juga membantah klaim Harita bahwa tidak ada korban jiwa yang timbul dari kecelakaan kerja selama beroperasi sejak 2019-2023. Sektor pertambangan dan pengolahan mineral mendominasi kasus kecelakaan kerja di Provinsi Maluku Utara sepanjang 2022, tempat tambang dan pengolahan nikel Harita Group berada.

Siapa investor di saham kotor Harita?

Menurut informasi publik dari beberapa berita terkini, setidaknya ada tiga nama investor yang membeli saham dari Harita saat penawaran umum perdana saham di Bursa Efek Indonesia. Nama-nama investor tersebut, yaitu Glencore International AG, Fidelity International, dan lembaga *Sovereign Wealth Funds* (SWF) di Asia.

GLENCORE
INTERNATIONAL AG

Glencore Internasional AG

Glencore adalah bagian dari investor yang membeli saham dari Harita Group (NCKL) selama penawaran umum perdana. Hal ini menunjukkan kurangnya komitmen iklim Glencore karena Harita telah merusak lingkungan.

Glencore merupakan perusahaan perdagangan dan pertambangan komoditas multinasional Swiss. Perusahaan ini adalah salah satu perusahaan sumber daya alam terdiversifikasi terbesar di dunia yang terlibat dalam memproduksi, sumber, memproses, memurnikan, mengangkut, menyimpan, membiayai, dan memasok logam dan mineral, energi, dan produk pertanian.

Komitmen lingkungan dari Glencore saat ini sedang menjadi pertaruhan ketika mereka berinvestasi ke proyek Harita yang disorot atas berbagai kesalahan atas pengelolaan limbah. Glencore memang telah setuju untuk menyelaraskan bisnis

dan investasinya dengan tujuan Perjanjian Paris (untuk membatasi pemanasan hingga jauh di bawah 2 derajat dan untuk mencapai emisi nol bersih pada paruh kedua abad ini) sebagai hasil dari keterlibatan yang dipimpin oleh Climate Action 100+. Dengan membeli saham dari Harita, Glencore telah melanggar janji mereka untuk menyelaraskan dengan Perjanjian Paris.

Fidelity International

Fidelity, sebuah perusahaan jasa keuangan multinasional Amerika, adalah bagian dari investor yang membeli saham dari Harita selama penawaran umum perdana. Fidelity merupakan salah satu manajer aset terbesar di dunia, dengan $4.9 triliun aset yang dikelola per-Desember 2021.

Fidelity berpotensi gagal mencapai komitmen lingkungannya karena menambah portofolio pada Harita. Portofolio tersebut mendapat banyak sorotan terkhusus terkait aspek lingkungannya mulai dari penggunaan PLTU hingga pembuangan limbah yang sembarangan. Fidelity ikut menandatangani The Net-Zero Asset Managers bagian dari Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) yang menetapkan target emisi untuk mengurangi separuh jejak karbon dari portofolio investasi mereka pada tahun 2030. Target tersebut dimulai tahun 2020, dimulai dengan kepemilikan ekuitas dan obligasi korporasi, dan mencapai nol bersih untuk kepemilikan pada tahun 2050.

Sovereign Wealth Funds di Asia

Beberapa dana kekayaan negara (Sovereign Wealth Funds/SWF) Asia diketahui menjadi investor di Harita. Namun, ditemukan kejanggalan karena nama SWF tersebut tidak diungkapkan secara transparan.

Penjamin Emisi Saham Harita

Penjamin emisi efek memainkan peran penting dalam penawaran umum perdana (IPO). Biasanya, penjamin emisi adalah bank investasi, bank komersial, atau perusahaan pialang. Mereka dipilih oleh perusahaan yang akan *go public*. Penjamin emisi berfungsi sebagai perantara antara perusahaan yang ingin menerbitkan saham dalam IPO dan investor. Selain itu, mereka mungkin membeli dan menjual seluruh masalah IPO kepada investor.

Harita memilih beberapa penjamin emisi dengan reputasi mewah dalam keamanan untuk go public. Mereka adalah Credit Suisse Group, BNP Paribas, Citigroup, dan Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek. DBS, OCBC Securities, dan UOB Kay Hian sebagai penjamin pelaksana emisi efek.

Enam dari tujuh penjamin emisi Harita, kecuali Mandiri Sekuritas, adalah anggota *Net-Zero Banking Alliance*, yang merupakan bagian dari *Glasgow Financial Alliance for Net Zero* (GFANZ).

Foto: Rabul Sawal/ JATAM

Net-Zero Banking Alliance

GFANZ diluncurkan pada April 2021 selama konferensi iklim COP26 di Glasgow, Skotlandia. Ini adalah aliansi lembaga keuangan yang menjadi anggota dengan bergabung dengan salah satu dari tujuh aliansi khusus sektor *net-zero*, termasuk *Net-Zero Banking Alliance*, dengan lebih dari 550 anggota dari 50 negara, termasuk banyak lembaga keuangan paling kuat di dunia (GFANZERO).

Di Indonesia, GFANZ juga merupakan salah satu entitas pendorong kebijakan kemitraan transisi energi berkeadilan (*Just Energy Transition Partnership*). Salah satu bentuk dukungan GFANZ adalah pensiun dini PLTU. Komitmen GFANZ tersebut dapat tercederai akibat enam membernya saat ini menjadi bagian dari investasi kotor pada perusahaan Harita Group. Apalagi HSBC dan Citigroup terlibat sebagai penjamin emisi efek Harita Group. Tujuan utama GFANZ terancam gagal total. Keenam anggota tersebut pun telah terbukti melanggar janji dan jauh dari target emisi nol bersih.

Pembeli nikel kotor Harita

Pendapatan Harita setidaknya mencapai Rp29,8 triliun selama empat tahun pada 2019-September 2022. Pendapatan tersebut berasal dari penjualan nikel yang telah diolah menjadi feronikel atau prekursor baterai (MHP) ke beberapa perusahaan, yaitu dari China: Lygend Resources & Technology Co Ltd, Ningbo Lygend Wisdom Co Ltd, Ningbo Lygend Mining Co Ltd, dan Spring Treasure Global Ltd; dari Singapura, Guang Xing Trading Pte Ltd dan Trafigura Asia Trading Pte Ltd; dari Swedia Minmetals North-Europe AB; dan dari Swiss, Glencore International AG.

Daftar Pembeli Nikel Kotor Harita Group 2019-2022

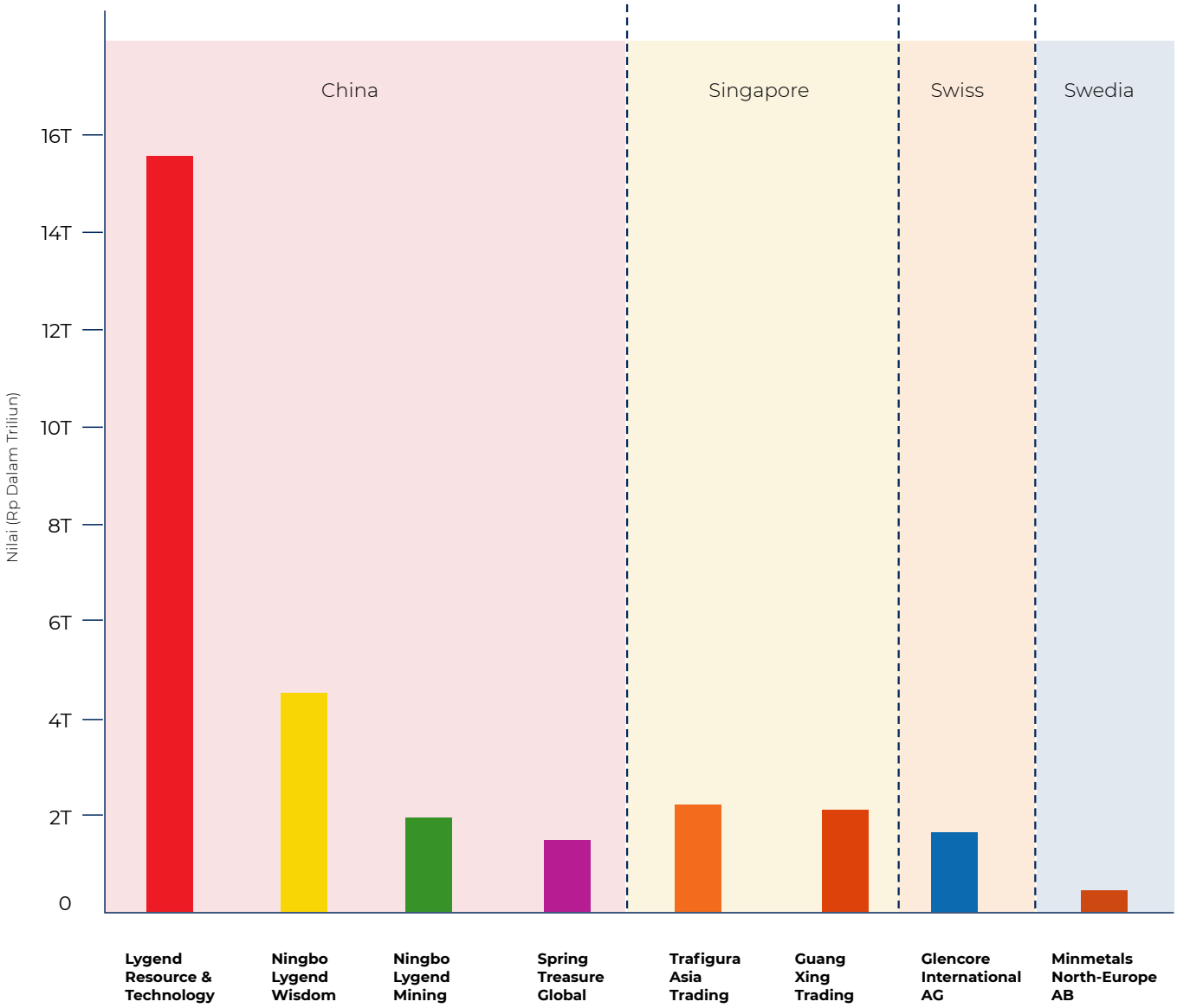

Grafik 3: Daftar Pembeli Nikel Harita Group 2019-2022 (data diolah Trend Asia, 2023)

Seruan

Sejauh ini, lembar fakta ini ingin menunjukkan bahwa telah terdapat kerusakan masif akibat dari operasi Harita Group baik secara lingkungan, sosial dan ekonomi lokal. Dana yang akan terkumpul dari IPO sangat mungkin akan memperbesar daya rusak tersebut. Oleh karena itu, ini adalah pertanyaan tentang nilai, nilai dari investasi, melebihi kuantitas dollar atau rupiah yang akan terkumpul. Apakah operasi Harita Group selama ini telah menciptakan nilai yang baik bagi warga lokal di tapak-tapaknya masing-masing? ataukah kesengsaraan akibat ruang hidup dan lahan penghidupannya yang dirusak. Bukti-bukti menunjukkan bahwa kesengsaraan adalah yang dihadirkan. Oleh karena itu, kami menyerukan:

1. Kepada para calon pembeli saham NCKL, untuk secara kritis mempertanyakan kualitas dari investasi, nilai dari investasi, termasuk kepada para penjamin emisi efek, kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. Kepada para pemilik saham NCKL, untuk mengevaluasi secara mendalam portofolio investasinya, dan kontribusinya terhadap kerusakan alam dan perusakan ruang hidup dan lahan warga, dan untuk bertanggung jawab atas kontribusinya.
3. Kepada para penjamin emisi efek, untuk secara serius melihat kembali prosedur uji tuntas atau uji kelayakan (*due diligence*) akan emiten yang dibantu untuk melantai di bursa. Jelas, banyak fakta yang terlewat dalam proses IPO ini, dan untuk bertanggung jawab atas kontribusinya.
4. Kepada para pembeli produk Harita Group dalam berbagai levelnya, untuk secara serius dan transparan memastikan bahwa rantai pasok perusahaan tidak tersangkut dengan perusakan lingkungan hidup, perusakan ruang hidup dan lahan penghidupan warga lokal, dan untuk bertanggung jawab atas kontribusinya.
5.

Selain itu, kami juga menyerukan kembali tuntutan JATAM untuk dilakukannya evaluasi menyeluruh atas operasi Harita Group, untuk menahan diri untuk berinvestasi, melakukan penegakan hukum dan pemulihan kerusakan. Secara khusus kepada OJK dan BEI, untuk mempertimbangkan kembali keputusan untuk memberi akses Harita Group ke lantai bursa.